**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONTRIBUSI**

**PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Ahmad Dani[[1]](#footnote-1)**

**ABSTRACT**

# Tax is a mandatory contribution collected by the government from the community (taxpayer) to cover the state's routine expenses and development costs without remuneration that can be directly appointed. Motorized vehicle tax is a tax on the ownership and / or control of motorized vehicles, all wheeled vehicles and their vehicles used on all types of road and movement by technical equipment. The formulation of the problem is 1). How big is the contribution of Motor Vehicle Tax (PKB) to Regional Original Income (PAD) in East Kutai District ... 2). What are the obstacles and difficulties in the field in the process of citing Motor Vehicle Taxes (PKB) in East Kutai Regency. The type of data used in this study is secondary data types. Secondary data is data obtained both unprocessed and processed, either in the form of numbers or in the form of description. In this study secondary data taken from the literature relevant to research titles such as books, magazines, articles, time / period of technical instructions and others that have relevance to the problem under study.

# The results of the study show the contribution of motor vehicle tax (PKB) to original income. The lowest area in 2013 of 12.90% was included in the low or low category. Thus the contribution or benefits provided by the acceptance of Motor Vehicle Tax (PKB) on Regional Original Income in 2013-2017 is still low. However, Regional Original Income is not only influenced by the acceptance of Motor Vehicle Tax (PKB), because there are still other income receipts that can affect Regional Original Income (PAD

# *Keywords :* Motorized Vehicles, Contributions, Regional Original Income

**I. PENDAHULUAN**

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Besarnya peran yang diberikan oleh pajak sebagai sumber dana dalam pembangunan nasional, maka tentunya perlu lebih digali lagi potensi pajak yang ada dalam masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan bangsa ini. Salah satu sumber potensi pajak yang patut digali sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan pembangunan bangsa sekarang ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai peran penting dalam memberikan kontribusi pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD diupayakan melalui pemberdayaan segenap potensi yang dimiliki daerah.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah proporsi anggaran belanja yang memperhatikan juga peningkatan pelayanan pada sektor publik. Melihat perkembangan yang terjadi terhadap potensi pendapatan melalui pajak terutama di Kabupaten Kutai Timur, dari perbandingan perolehan daerah melalui pajak. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki persentase sekitar 45 % dari seluruh pajak yang ada. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini didukung oleh adanya upaya pajak, efektivitas dan efisiensi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini yang tercakup dalam wilayah kerja Kabupaten Kutai Timur.

Data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Kabupaten Kutai Timur. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 4 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah, salah satu diantaranya adalah tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dari hasil sementara, pencapaian pendapatan daerah serta realisasi anggaran belanja selama lima tahun (2013-2017) pada Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Kabupaten Kutai Timur, tiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan melalui upaya efektivitas dan efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pendapatan yang diperoleh pada Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Kabupaten Kutai Timur melalui kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan gambaran adanya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Dalarn pelaksanaan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian pajak dengan memberdayakan potensi pajak, dalam hal ini Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), agar lebih diarahkan pada kegiatan perencanaan dan penyusunan kegiatan. Hal ini dilakukan dalam rangka pengoptimalisasian dan penyesuain antara pendapatan yang diterima dengan pengeluaran daerah. Penerimaan pendapatan yang diperoleh Dinas.

Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Kabupaten Kutai Timur, memberi-kan prospek yang bisa diharapkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama perolehan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

**II.PERUMUSAN**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Timur.
2. Apa saja hambatan dan kesulitan di lapangan dalam proses pengutipan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Kutai Timur.

**III. METODE PENELITIAN**

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara nyata dan sistematis terhadap fakta atau karakter. Populasi atau bidang tertentu dengan secara cermat dan faktual. Dengan kata lain peneliti bertujuan untuk menggambarkan secara nyata tepat dan akurat terhadap penelitian yang ada di lapangan. Tanpa melakukan pengujian hipotensis

Motode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Model Analisis deskriptif, maka untuk menganalisis data yang telah terkumpul, data diolah dengan menghitung data-data yang berbentuk kuantitatif (angka-angka) dan dinyatakan dengan data kualitatif untuk menginterprestasikan hasil data perhitungan tersebut serta menyertai dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data kualitatif untuk memecahkan masalah yang diteliti yang akhirnya akan menarik kesimpulan dari pengolahan data tersebut. Adapun langkah-langkah pengolahan datanya adalah sebagai berikut:

1. Analisis Efektifitas

Menurut Ruslan (2006:189) Besarnya efektifitas dapat dihitung dengan langkah sebagai berikut :

1. Membuat tabel penerimaan PKB tahun 2013-2017, dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2013-2017.
2. Menyusun tabel analisis efektivitas PKB yaitu perbandingan antara penerimaan dan potensi PKB pada tahun 2013-2017, Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas PKB adalah:

Re*alisasiPenerimaan PKB*

Efektivitas PKB = *x* 100%

*Potensi PKB*

Tabel 3.1 Interpretasi Nilai Efektifitas

|  |  |
| --- | --- |
| Persentase | Kriteria |
| >100% | Sangat Efektif |
| 90-100% | Efektif |
| 80-90% | Cukup Efektif |
| 60-80% | Kurang Efektif |
| <60% | Tidak Efektif |

### Analisis laju Pertumbuhan

Menyusun tabel laju pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2013 - 2017, sehingga dapat diketahui tingkat perkembangan penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten Kutai Timur. Menurut Abdul, (2004:163) Adapun untuk menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan pendapatan daerah digunakan rumus sebagai berikut:

*Xt −* *x* (*t −* 1)

Gx **=** *x* 100%

*x* (*t* − 1)

Keterangan :

Gx = Laju pertumbuhan penerimaan PKB Kabupaten Kutai Timur pertahun

Xt = Realisasi penerimaan PKB Kabupaten Kutai Timur tertentu

X(t-1) = Realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur pada tahun sebelumnya.

### Analisis Kontribusi

Menyusun tabel analisis kontribusi realisasi PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah. Demi mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi PKB maka untuk mengklasifikasikan kriteria kontribusi PKB terhadap Pendapatan Daerah. Menurut Halim (2004:58) digunakan rumus sebagai berikut :

Re *alisasi*.*Penerimaan*.*PKB*

Kontribusi PKB = *x* 100%

Re*alisasiPenerimaanPAD*

Tabel 3.2 Kriteria Kontribusi

|  |  |
| --- | --- |
| Persentase | Kriteria |
| 0,00-10% | Sangat Kurang |
| 10,10%-20% | Kurang |
| 20,10%-30% | Sedang |
| 30,10%-40% | Cukup Baik |
| 40,10%-50% | Baik |
| Diatas 50% | Sangat Baik |

Berdasarkan teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian yang Berdasarkan Model Analisis data dan instrumen penelitian yang digunakan, maka teknik analisis dalam penelitian ini adalah dengan cara menganalisis data secara kuantitatif dan akan disajikan secara deskriptif evaluatif. Teknik ini di pergunakan untuk menggambarkan masalah yang ada berdasarkan jawaban yang sesuai dengan kenyataan di lapangan, selanjutnya dianalisa kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran. Jadi penulis berupaya untuk meneliti dan menemukan fakta atau informasi seluas mungkin untuk mendapatkan gambaran dari permasalahan yang selanjutnya akan dianalisa guna mencari solusi dan alternative terhadap Analisis pajak khususnya Pajak Kendaraan bermotor (PKB) sebagai sumber Pendapatan Daerah di Kabupaten Kutai Timur.

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.2 Hasil Penelitian**

Analisis Statistik Deskriptif adalah variabel terikat, variabel bebas dan variabel kontrol, penelitian ini digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Timur sehingga akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kebijakan yang harus diambil dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi daerah.

Dalam Undang undang No. 28 Tahun 2007 (UU KUP yang baru), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*.* Wajib pajak merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perkembangan daerah secara keseluruhan maupun dalam ruang lingkup pedesaan karena wajib pajak merupakan obyek pajak yang merupakan pengerak pembangunan bangsa dan Negara. Oleh sebab itu berbagai hal diupayakan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam bidang perpajakan.

### 4.2.1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pendapatan Daerah yang sah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu tahun 2013-2017 terus mengalami kenaikan setiap tahun. Kenaikan tersebut dapat diraih karena adanya upaya antara lain dilakukannya intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan mutu layanan, mendekatkan tempat pelayanan kepada wajib pajak melalui SAMSAT Keliling dan semakin membaiknya perekonomian masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun secara absolut. Pajak daerah merupakan pemberi kontribusi terbesar dibandingkan dengan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari total Pendapatan Daerah selama Tahun anggaran 2013 sampai dengan Tahun 2017, Kontribusi yang terbesar adalah berasal dari Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan sebagian besar masih didukung dana dari Pendapatan Daerah (PAD) dan Pemerintah Pusat. Dari beberapa sumber pajak daerah, sejak kurun waktu tahun 2013-2017, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sebagai sumber pendapatan daerah terbesar dibandingkan dengan jenis penerimaan daerah dari Pajak Daerah yang lain. Jika diperhatikan secara menyeluruh selama kurun waktu tahun 2013 hingga 2017, Pajak Kendaraan Bermotor yang memberikan kontribusi lumayan besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur yang bersumber dari pajak daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan PERDA Nomor 4 Tahun 2003**.** Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis Pajak Daerah yang pungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten atau kota, dalam Peraturan Daerah yang menjadi obyek pajak adalah pengguna hak tanah dan bangunan.

# Tabel 4.4 Penerimaan PKB tahun 2013-2017, dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Kabupaten Kutai Timur tahun 2013-2017.

|  |  |
| --- | --- |
| Tahun | Realisasi Penerimaan PKB Kabupaten Kutai Timur (Rp) |
| 2013 | 5,215,795,794 |
| 2014 | 6,768,217,997 |
| 2015 | 5,258,512,140 |
| 2016 | 6,326,388,246 |
| 2017 | 6.418,335,193 |

Sumber: *SAMSAT Kabupaten Kutai Timur*

### 4.2.2 Pajak Daerah

Pajak daerah di kabupaten Kabupaten Kutai Timur merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pada wajib pajak. Penarikan pajak dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Kutai Timur di berbagai subsektor dalam meningkatkan Pajak daerah yang pembayarannya disatukan ke dalam rekening dan disetorkan ke Bapeda. Potensi penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam merencanakan dan menghitung pendapatan daerah secara tepat. Hal demikian dapat dijadikan sarana untuk mengetahui kemampuan pembiayaan yang diharapkan dapat dipenuhi dari potensi pendapatan daerah setempat, sebelum melakukan berbagai macam pembiayaan dari sumber lain, termasuk dari pos pinjaman daerah. Lebih jauh diungkapkan bahwa pembiayaan pembangunan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi daerah yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Dengan dikuranginya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan terbesar.

Potensi Pajak daerah di kabupaten Kabupaten Kutai Timur sangat potensial untuk digali. Dari sisi penerimaan pajak daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang memiliki penerimaan cukup besar dari penerimaan pos-pos Pajak Daerah Kabupaten Kutai Timur. Dengan semakin meningkatnya penerimaan pajak daerah berbagai subsektor diharapkan semakin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### 4.2.3 Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Tingkat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Kabupaten Kutai Timur dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

# Tabel 4.5 Analisis efektivitas PKB Tahun 2013-2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Target Potensi  PKB ((Rp) | Realisasi  PKB (Rp) | Efektivitas  PKB (%) | Keterangan |
| 2013 | 4,451,137,193 | 5,215,795,794 | 117.18 | Sangat Efektif |
| 2014 | 4,783,792,531 | 6,768,217,997 | 141.48 | Sangat Efektif |
| 2015 | 4,131,456,244 | 5,258,512,140 | 127.28 | Sangat Efektif |
| 2016 | 4,229,983,144 | 6,326,388,246 | 149.56 | Sangat Efektif |
| 2017 | 4,500,110,060 | 6.418,335,193 | 142.63 | Sangat Efektif |

Sumber: *SAMSAT Kabupaten Kutai Timur*

Berdasarkan tabel penerimaan efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diatas, dapat diketahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Tahun 2013 – 2017, untuk selanjutnya dapat dikategorikan pada tingkat tertentu, yaitu tidak efektif, kurang efektif, cukup efektif, efektif, atau bahkan sangat efektif. Tingkat efektivitas mulai tahun 2013 yaitu sebesar 117.18 % hal ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari tahun 2013 termasuk pada kategori sangat Efektif. Dan pada tahun 2014 diperoleh efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 141.48 %, termasuk dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2015 diperoleh efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 127.28 % termasuk dalam kategori sangat efektif. Diperoleh efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 149.56 % yang termasuk dalam kategori sangat efektif pada tahun 2016. Dan pada Tahun 2017 diperoleh efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 142.63 % termasuk dalam katagori sangat efektif.

### 4.2.4 Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dengan menggunakan analisis laju pertumbuhan kita dapat mengetahui seberapa besar pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama tahun pengamatan, berikut ini adalah tabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama kurun waktu 4 tahun dari Tahun 2013-2017 dapat kita lihat sebagai berikut :

# Tabel 4.6 Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun | Realisasi PKB (Rp) | Persentase Laju Pertumbuhan (%) |
| 2013 | 5,215,795,794 | - |
| 2014 | 6,768,217,997 | 29.76 |
| 2015 | 5,258,512,140 | -22.31 |
| 2016 | 6,326,388,246 | 20.31 |
| 2017 | 6.418,335,193 | 1.45 |

Sumber: *SAMSAT Kabupaten Kutai Timur*

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Pada Tahun 2014 dan 2016 laju pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami penurunan menjadi -22.31 % pada Tahun 2015.

### 4.2.5 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Timur dihitung dengan membandingkan jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan jumlah penerimaan Pajak Daerah (PAD). Besarnya Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pajak Daerah dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

# Tabel 4.6 Analisis Kontribusi Realisasi PKB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)Tahun 2013-2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Realisasi PKB (Rp) | Realisasi PAD  (Rp) | Kontribusi (%) | Keterangan |
| 2013 | 5,215,795,794 | 40,423,494,270 | 12.90 | Kurang |
| 2014 | 6,768,217,997 | 43,874,493,673 | 15.43 | Kurang |
| 2015 | 5,258,512,140 | 38,882,955,230 | 13.53 | Kurang |
| 2016 | 6,326,388,246 | 35,197,940,016 | 17.97 | Kurang |
| 2017 | 6.418,335,193 | 34,441,606,089 | 18.64 | Kurang |

Sumber: *SAMSAT Kabupaten Kutai Timur*

Berdasarkan data tabel diatas, kontribusi penerimaan PKB terhadap PAD Tahun 2013 sebesar 12.90 % dapat dikategorikan pada kriteria kurang, Pada Tahun 2014 kontribusi penerimaan PKB mengalami peningkatan menjadi 15.43 %, sedangkan pada tahun 2015 kontribusi penerimaan PKB mengalami penurunan, sehingga kontribusinya sebesar 13.53 %, sehingga dapat dikategorikan pada kriteria kurang, penerimaan PKB mengalami peningkatan selama 2 tahun berturut-turus yaitu pada tahun 2016 dan 2017 yang masing-masing 17.97 % di tahun 2016 dan 18.54 % pada tahun2017, dan dapat dikatagorikan dalam kritaria kurang.

**4.3 Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap daerah-daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan biaya kepada masyarakat berupa pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang berlaku, memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan pemerintahan di daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Adanya pemberian otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan lebih mandiri. Pengalihan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, kewenangan pemungutan jenis-jenis pajak daerah didasarkan atas prinsip keadilan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada daerah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan dalam membiayai pembangunan perlu dikelola dengan baik. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai kebijakan yang lebih komprehensif, efektif dan efisien dalam mengelolanya. Kebijakan ekonomi yang dilancarkan Kabupaten Kutai Timur dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan perkapita sampai pada pemerataan hasil pembangunan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diharapkan.

Berdasarkan APBD, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari: Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pajak Daerah yang potensial terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Kendaraan di Atas Air (PKA), Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBN-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar Kabupaten Kutai Timur.

Penerimaan efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diatas, dapat diketahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Tahun 2013 - 2017 untuk selanjutnya dapat dikategorikan pada tingkat tertentu, yaitu tidak efektif, kurang efektif, cukup efektif, efektif, atau bahkan sangat efektif. Tingkat efektivitas mulai tahun 2013 yaitu sebesar 117.18 % hal ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari tahun 2013 termasuk pada kategori sangat efektif. Dan pada tahun 2014 diperoleh efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 141.48 %, termasuk dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2015 diperoleh efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 127.28 % termasuk dalam kategori sangat efektif, pada tahun 2016 diperoleh efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 149.56 % yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Dan pada Tahun 2017 diperoleh efektivitas penerimaan PKB sebesar 142.63 % termasuk dalam katagori sangat efektif.

Laju pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Pada Tahun 2014 dan 2016 laju pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami penurunan menjadi -22.31 % pada Tahun 2015.

Realisasi penerimaan dari Pemerintah Pusat sebagai pembanding terhadap pendapatan daerah karena pada tahun 2013-2017, kontribusi penerimaan PKB terhadap PAD Tahun 2013 adalah sebesar 12.90 % dapat dikategorikan sebagai kriteria kurang, pada tahun 2014 kontribusi penerimaan PKB meningkat menjadi 15.43%, untuk tahun 2015 kontribusi penerimaan PKB adalah sebesar 13.53 %, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dan dapat dikategorikan pada kriteria kurang. Kontribusi pada Tahun 2016 adalah sebesaar 17.97 % dapat dikatagorikan sebagai kurang. Dan terjadi lagi peningkatan pada Tahun 2017 menjadi 18.64 %, dapat dikatagorikan sebagai kurang.

Pajak Kendaraan Bermotor terus meningkat dari tahun ke tahun secara absolute, hal ini menggambarkan adanya perkembangan yang cukup baik dalam pengeloaan pajak daerah, yang diharapkan penerimaan daerah dari Pajak kendaraan bermotor dapat dijadikan sumber pembiayaan yang manjadi harapan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Timur.

Jumlah kendaraan roda II dan roda IV terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, karena adanya peningkatan taraf hidup masyarakat dimana kendaraan bermotor baik roda II maupun roda IV tidak lagi dianggap kebutuhan mewah melainkan merupakan kebutuhan primer dalam rangka menunjang kegiatan sehari-hari, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa sumber penerimaan daerah yaang berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi sumber penerimaan daerah sangat penting dan perlu harus dikelola dengan baik guna menunjang penerimaan asli daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur.

Peningkatan realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari kontribusi PKB yaitu dengan adanya penerapan Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (Super PKB) karena semakin banyak wajib pajak yang rutin membayar pajaknya maka otomatis penerimaan daerah makin meningkat. Sementara itu peningkatan kinerja pelayanan kepada wajib pajak melalui SAMSAT keliling juga sangat penting karena akan lebih memudahkan bagi wajib pajak untuk membayar pajaknya dan lebih efisien dan efektif. Dan juga peningkatan jual beli kendaraan bermotor roda II maupun roda IV akan lebih meningkat jika kulitas sarana dan prasarana jalan yang menghubungkan provinsi, kabupaten/kota se-Kutai Timur maka akan lebih banyak masyarakat yang akan membeli kendaraan bermotor sehingga kontribusi dari masing-masing pajak tersebut akan lebih meningkat.

**V. PENUTUP**

## 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai tingkat efektivitas pemungutan dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilakukan pada Tahun 2013-2017 didapatkan nilai tertinggi pada tahun 2016 dengan kriteria sangat efektif yaitu sebesar 149.56 %. Efektivitas terendah terjadi pada Tahun 2013 yaitu sebesar 117.18 %, dengan kriteria sangat efektif.
2. Laju pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terendah terjadi pada Tahun 2015 sebesar -22.31 % dan laju pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tertinggi terjadi pada Tahun 2014 sebesar 29.76 %.
3. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah terendah pada tahun 2013 sebesar 12.90 % termasuk dalam kategori kurang atau rendah. Dengan demikian sumbangan atau manfaat yang diberikan oleh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2013-2017 masih rendah. Akan tetapi Pendapatan Asli Daerah tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) saja, karena masih terdapat penerimaan pendapatan lainnya yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Perolehan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara nominal memang sangat kurang, dengan demikian perlu diadakan upaya untuk melakukan peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan mengadakan program sosialisai kepada masyarakat serta peningkatan kesadaran masyarakat atas kewajiban wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur hendaknya meningkatkan kinerjanya, dengan cara memberikan pelayanan yang ramah kepada masyarakat atau wajib pajak agar wajib pajak nyaman dalam melakukan transaksi pembayaran pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dapat meningkatkan perolehan pendapatan daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih spesifik tentang data-data yang akan diperoleh dan lingkup yang lebih luas seperti lingkup Kabupaten Kutai Timu

**BIBLIOGRAFI**

Andriani,2003, *Perpajakan,* Renika Cipta, Jakarta.

Arikunto Suharsimin, 2004, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* Rineka Cipta. Jakarta,.

Abdul*,* 2004*, Otonomi Daerah*, Jilid 1 Edisi Ketiga, Jakarta.

Halim, 2004, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* Rineka Cipta. Jakarta.

Nurcholis, 2007, *Perpajakan*, PT Global Media Edukasi, Yogyakarta.

Mardiasmo, 2003 *Perpajakan*, Yogyakarta.

Muljono Djoko, 3005, *PPH dan PPN untuk berbagai kegiatan usaha*, Edisi 1. ANDI offset, Yogyakarta

Pamudji, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*. Bumi Aksara,Jakarta.

Guritno. 2002, *Kontribusi Pajak,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rachmat, 2005, *Sumitro Pajak Kendaraan Bermotor,* Eresco, Bandung.

Rusyadi, 2005, *Peranan pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, Universitas Islam Indonesia.

Ruslan, 2006, *Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),* Edisi I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Suandy, 2008, *Pengantar Hukum Pajak*. Rineka Cipta, Jakarta.

Smeets, 2004, *Pengantar Perpajakan,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Santoso, 2002, *Hukum Perpajakan,* Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo*, 2001, Pembangunan Nasional,* PT grafika Indo, Bandung.

1. Alumni Fisipol Untag 1945 Samarinda [↑](#footnote-ref-1)